



# **L A P O R A N**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI JAWA BARAT**

**DALAM  
RANGKA**

**PENGAWASAN PELAKSANAAN TESTING DAN  
TRACING COVID-19 DI PROVINSI JAWA BARAT**

**TANGGAL 24 SEPTEMBER 2021**

**SAMPAI DENGAN**

**TANGGAL 26 SEPTEMBER 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, SEPTEMBER 2021**



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
PENGAWASAN PELAKSANAAN TESTING DAN TRACING  
VAKSIN COVID-19 DI PROVINSI JAWA BARAT  
TANGGAL 24 SEPTEMBER S.D. 26 SEPTEMBER 2021**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pandemi COVID-19 telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia, sejak pertama kali dilaporkan ke WHO pada akhir Desember 2019. Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus konfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang trendnya terus meningkat untuk penambahan kasus positifnya. Dalam kurun waktu satu bulan pertama penyebaran COVID-19 telah dilaporkan di 34 provinsi. Hingga tanggal 21 September 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 3.263 orang sehingga total kasus kumulatif mencapai 4.195.958 orang. Walaupun ada trend penurunan kasus di banding 1 bulan yang lalu, namun jumlah kematian harian masih sangat tinggi yaitu 171 orang sehingga totalnya mencapai 140.805 orang.

Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) terus memperingatkan bahwa secara global kasus COVID-19 terus bertambah. Dengan adanya variant-variant baru COVID-19, WHO meminta negara-negara memperketat surveilans dan meningkatkan testing dan tracing. Adanya variant Mu yang telah ditetapkan menjadi *variant of interest* dan telah menyebar di 39 negara hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dan Satgas COVID-19.

Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia. Walaupun saat ini tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi maupun ICU pasien Covid-19 sudah di bawah 60 % yang merupalam ambang ambang batas *Bed Occupancy Rate (BOR)* ideal dari WHO, namun seluruh sistem fasilitas pelayanan kesehatan harus terus waspada untuk mengantisipasi adanya kenaikan kasus di masa mendatang. Selain itu, di beberapa wilayah Indonesia, situasi pandemi COVID-19 berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan di posyandu dan puskesmas di beberapa daerah. Hal ini sangat memprihatinkan sebab Posyandu dan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan mempercepat dan meningkatkan kapasitas pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19. Pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi merupakan satu proses rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang akan berhasil dilakukan jika dilakukan dengan cepat dan disiplin. Untuk itu, proses ini membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya dan koordinasi antara unit pemerintah pada berbagai level.

### **Testing dan Tracing COVID-19**

Testing dan tracing menjadi salah satu area penanganan COVID-19 yang perlu terus ditingkatkan. Dalam dua bulan terakhir, Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelaksanaan penguatan 3T (*testing, tracing dan treatment*) yang saat ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI sudah mulai memperlihatkan hasil. Ini terlihat dari *testing rate* di tiap daerah yang terus naik serta *positivity rate* yang terus turun. Berdasarkan update terakhir dari Kementerian Kesehatan tanggal 20 September

2021, kasus positif di Indonesia sebanyak 1.932 kasus positif dengan jumlah spesimen sebanyak 202.795 spesimen. Berdasarkan hasil tersebut maka tingkat *positivity rate* Indonesia per 20 September 2021 sudah di bawah 1,%. Hal ini sudah jauh dibawah standar yang sudah ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 5%. Namun apabila dilihat dari jumlah spesimen yang diperiksa, masih fluktuatif, jumlah spesimen tertinggi dalam seminggu terakhir terjadi pada tanggal 17 September 2021 dimana total spesimen yang dites adalah sebanyak 388.292 spesimen.

Namun hasil tersebut apabila dilihat secara komprehensif masih perlu adanya perbaikan, mengingat hasil tes ini masih didominasi dari pulau Jawa dan Bali, sedangkan untuk daerah-daerah lain di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan laboratorium di beberapa daerah yang masih jauh dari standar yang ditetapkan, dimana berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/234/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Uji *Real Time-Polymerase*(RT-PCR) SARS-Coc-2 Bagi Laboratorium di Lingkungan Rumah Sakit dan Laboratorium Lain Yang Melakukan Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa standar minimal laboratorium yang dapat mendukung tes PCR adalah laboratorium *biosafety level 2* atau BSL-2 agar hasil yang didapat akurat. Selain itu juga sudah memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, peralatan dan sumber daya manusia serta *good laboratory practice*, sehingga tidak semua dan sembarang laboratorium boleh melakukan pemeriksaan COVID-19.

Dalam ikhtisar mingguan COVID-19 dari yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, yang menyebutkan bahwa kinerja laboratorium berbasis PCR dapat dinilai karena menggunakan sistem allrecord tc-19 melalui <http://allrecord-tc19.kemkes.go.id/>. Ukuran kinerja laboratorium secara waktu, dapat dimonitor melalui indikasi sebagai berikut :

- a. waktu terima-hasil: waktu yang diperlukan oleh laboratorium sejak menerima spesimen sampai hasil keluar;
- b. waktu hasil-verifikasi: waktu yang diperlukan oleh laboratorium sejak keluar hasil sampai dengan input data ke sistem; dan
- c. waktu terima-verifikasi: waktu yang diperlukan oleh laboratorium sejak menerima spesimen sampai dengan input data ke sistem.

Berdasarkan data hasil tes spesimen yang diinput ke sistem pada 5 – 11 September 2021 (minggu ke 36 epidemiologi), secara nasional terlihat 96% (539.238) spesimen memiliki waktu tunggu pemeriksaan (sejak spesimen diterima sampai di masukkan ke all record tc-19 / terima-verifikasi)  $\leq 2$  hari. Namun masih terdapat beberapa provinsi dan laboratorium yang perlu dilakukan percepatan baik dari sisi pemeriksaan maupun dari sisi kecepatan pelaporan.

Komisi IX DPR RI memberikan perhatian yang sangat beda atas pelaksanaan testing dan tracing yang merupakan kunci keberhasilan pengendalian pandemi. Untuk itu, Komisi IX DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan pelaksanaan tracing dan testing di 3 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

## 1.2 Landasan

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f
2. Kesimpulan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 19 Agustus 2021.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang pelaksanaan *testing* dan *tracing* COVID-19 di Provinsi Jawa Barat.

2. Mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan *testing* dan *tracing* COVID-19.
3. Memperoleh masukan langsung dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan *testing* dan *tracing* COVID-19 di Provinsi Jawa Barat.
4. Menyusun rekomendasi yang dapat ditujukan kepada semua pihak agar pelaksanaan *testing* dan *tracing* COVID-19 di Provinsi Jawa Barat khususnya dan di Indonesia dapat terus ditingkatkan.

#### 1.4 Keluaran

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI dalam melaksanakan *testing* dan *tracing* COVID-19 sehingga dapat terlaksana dengan lebih baik.

#### 1.5 Kegiatan Yang Dilaksanakan

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI telah melakukan pertemuan dengan Sekda Provinsi Jawa Barat, didampingi :

1. Ketua Satgas COVID-19 Jawa Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Dinas Kota Bandung
4. Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Balai POM Bandung
6. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat
7. Ketua Asosiasi Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat
8. Dirut RSUP Hasan Sadikin
7. Ketua Persi Jawa Barat
8. Ketua IDI Wilayah Jawa Barat

Pendamping Mitra Komisi IX DPR RI:

1. Kementerian Kesehatan RI (Pusdatin, Ditjen P2P, Ditjen Yankes, Ditjen Farmalkes)
2. Badan POM RI
3. BPJS Kesehatan

#### 1.5 Waktu Pelaksanaan

Kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021.

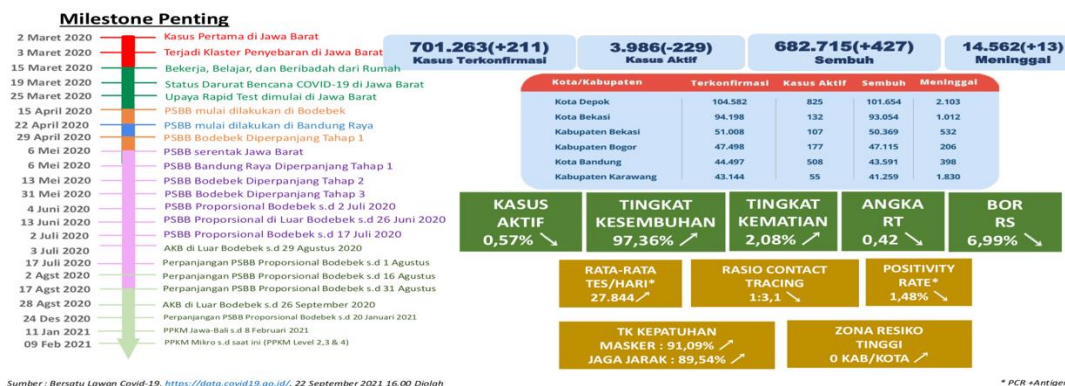
#### 1.6 Susunan Anggota Kunker Spesifik

Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Barat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena dari Fraksi Golkar. Adapun susunan Anggota Komisi IX DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A-331	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI IX	GOLKAR	NTT II
2.	A-177	TUTI NUSANDARI ROOSDIONO	ANGGOTA	PDIP	JATENG I
3.	A-190	RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM	ANGGOTA	PDIP	JATENG V
4.	A-200	Dr. DEWI ARYANI, M.Si	ANGGOTA	PDIP	JATENG IX
5.	A-320	M. YAHYA ZAINI, SH	ANGGOTA	GOLKAR	JATIM VIII
6.	A-70	Dr. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, MM	ANGGOTA	GERINDRA	JAMBI
7.	A-104	RAMSON SIAGIAN	ANGGOTA	GERINDRA	JATENG X
8.	A-369	Drs. FADHOLI	ANGGOTA	NASDEM	JATENG I
9.	A-387	RATU NGADU BONU WULLA, S.T	ANGGOTA	NASDEM	NTT II
10.	A-38	Ir. NUR YASIN, MBA, M.T	ANGGOTA	PKB	JATIM IV
11.	A-56	H. HARUNA, M.A, MBA	ANGGOTA	PKB	SULSEL I
12.	A-545	LINDA MEGAWATI, SE., M.Si	ANGGOTA	DEMOKRAT	JABAR IX
13.	A-553	Dra. LUCY KURNIASARI	ANGGOTA	DEMOKRAT	JATIM I
14.	A-569	HASAN SALEH	ANGGOTA	DEMOKRAT	KALTARA
15.	A-436	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si	ANGGOTA	PKS	JABAR VIII

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat terus membaik. Berdasarkan data Bersatu Lawan Covid-19 periode 13-19 September 2021, seluruh daerah di Jawa Barat kini berada di zona kuning atau kategori risiko rendah dengan skor 2,73, tingkat kepatuhan naik di 91,09%, jaga jarak naik di 89,54%. Periode sebelumnya atau 6-12 September 2021, dari 27 kab/kota tercatat masih masuk zona oranye atau risiko sedang yakni Kabupaten Cirebon. Namun kini statusnya mengalami perbaikan.

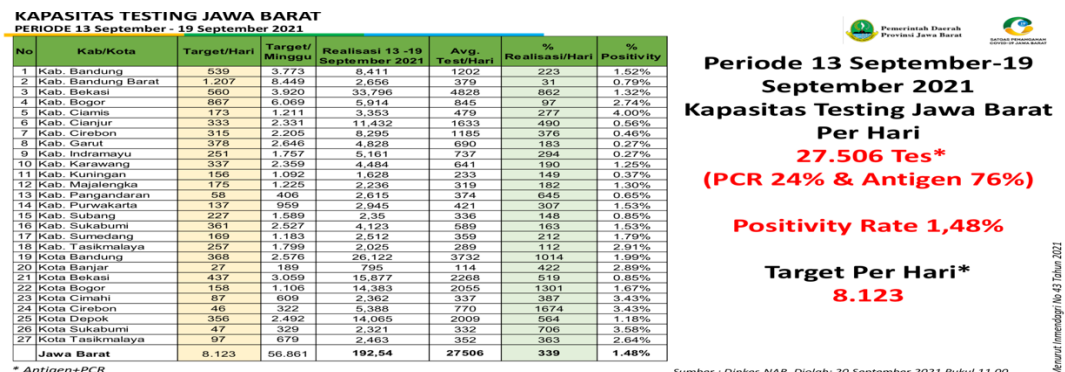


Angka kasus aktif juga terus menurun dimana angka kasus aktif di provinsi Jawa Barat berjumlah 3.843 atau turun 143 kasus dari hari sebelumnya. Di satu sisi angka kesembuhan meningkat 373 menjadi 683.088 orang. Dari jumlah tersebut, ada tiga daerah yang memiliki angka kasus aktif paling tinggi yakni Kota Cimahi 2,96 persen, Kabupaten Ciamis 1,62 persen, dan Kabupaten Bandung 1,16 persen.

Tingkat keterisian kamar tidur (*Bed Occupancy Rate/BOR*) untuk Covid-19 di rumah sakit rujukan kembali menurun. Dari puncaknya yang menjadi 91 persen kini menjadi 6,28 persen saja per 23 September 2021.



Meskipun penanganan pandemi COVID-19 relatif terus membaik, Pemda Provinsi Jabar bersama Pemda Kabupaten/Kota di Jabar terus berupaya meningkatkan tracing, testing, dan vaksinasi COVID-19. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan New All Record (NAR) Kemenkes RI pada periode 13-19 September 2021, rata-rata pengetesan COVID-19 di Jabar mencapai 27.506 tes per hari. Jumlah itu tiga kali lipat dari target pengetesan 8.123 tes per hari. Positivity rate-nya juga baik di bawah 5 persen, yakni 1,48 persen.



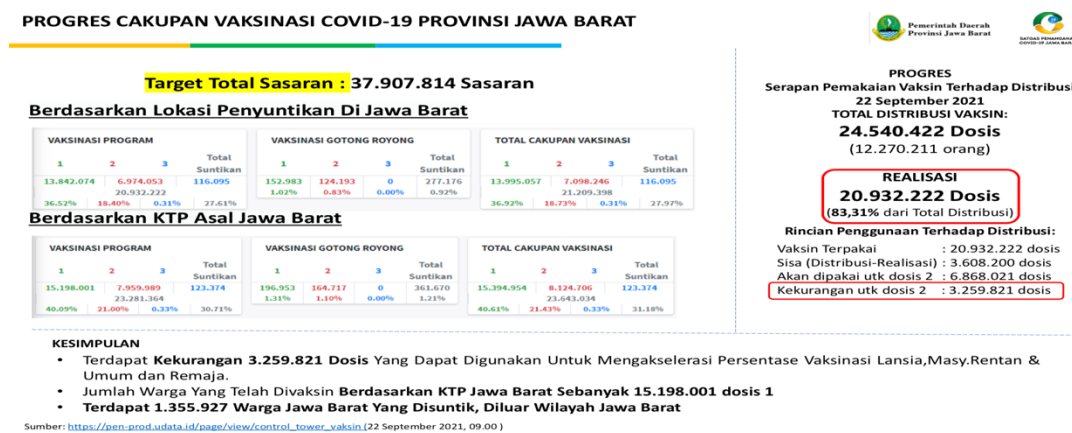


Jumlah tracer tenaga kesehatan di Jawa Barat (termasuk Kabupaten dan Kota) sebanyak 6.161 orang atau 31% (19.839) dari total tracer (tenaga kesehatan dan non-kesehatan). Beberapa kendala dan hambatan pengujian yaitu kapasitas/ketersediaan laboratorium pemeriksaan yang kurnag merata, ketidakpatuhan lab pemeriksa terhadap pelaporan baik NAR dan manual, gangguan pada sistem pelaporan dan ketersediaan alat penunjang pemeriksaan.

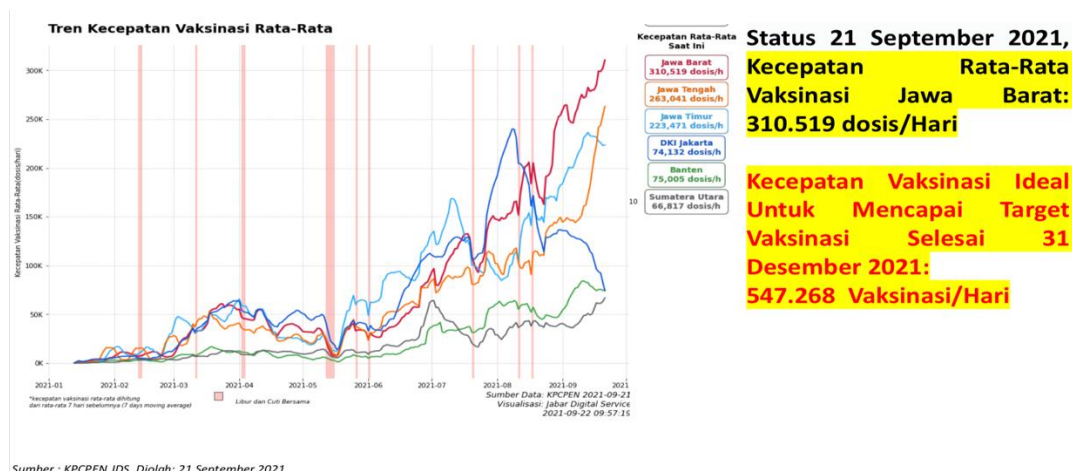
Terkait hasil Survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terhadap sekolah yang menggelar PTM terbatas di Jawa Barat bu yang menunjukkan 1.152 guru dan tenaga kependidikan serta 2.478 siswa terinfeksi Covid-19 selama gelaran PTM terbatas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mendalami hasil survey ini. Data ini dipublikasikan pada laman <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>, Kamis, 23 September 2021. Jika hal ini terjadi, maka PTM di sekolah tersebut sebaiknya dihentikan sementara sampai situasi membaik, serta pemkab/pemkot mengawasi lebih ketat lagi SOP dan penerapan proses di sekolah.

### Pelaksanaan vaksinasi Covid-19

Total distribusi vaksin yang telah diterima oleh Provinsi Jawa Barat, termasuk kabupaten/kota, adalah 24.540.422 dosis. Pelaksanaan penyuntikan di angka 21.658.726 dosis atau kurang lebih 83,31 persen dari total yang telah didistribusikan. Capaian vaksinasi di Jawa Barat terus meningkat dari hari ke hari. Per 24 September 2021, ada 21.658.726 dosis vaksin yang sudah disuntikkan ke masyarakat yang jadi sasaran.



Meskipun masih di atas daerah lain, namun kecepatan suntikan vaksin per harinya harus ditingkatkan. Karena kecepatan vaksin ideal agar target vaksinasi bisa selesai di Desember 2021 adalah 547.268 dosis per hari. Sudah 21,6 juta dosis kita suntikkan kemungkinan tertinggi di Indonesia sudah 311.000 dosis per hari.



Kecepatan rata-rata harian vaksinasi Jabar juga kini menjadi yang tertinggi di Indonesia, di angka 311.011 dosis per hari. Daerah lain seperti Jawa Tengah 250.487

dosis per hari, Jawa Timur 219.043 dosis, DKI Jakarta 62.031 dosis, Banten 77.129 dosis, dan Sumatera Utara 70.649 dosis per hari.

Jabar saat ini sedang kampanye “Menuju 37 Juta Warga Divaksin” yang ditargetkan selesai akhir Desember 2021. Untuk mencapai kekebalan komunal (*herd immunity*), selain cakupan vaksinasi yang baik juga diperlukan disiplin prokes 5M dan pola hidup bersih dan sehat dari masyarakat.

### **III. REKOMENDASI**

Berdasarkan diskusi dengan Sekda dan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan tracing dan testing serta penanganan pandemi secara di Provinsi Jawa Barat, maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama pemerintah daerah meningkatkan pelaksanaan tracing dan testing untuk mengetahui secara riil tingkat transmisi virus di masyarakat. Hal ini penting untuk dapat mengambil kebijakan berbasis data di masyarakat.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI meningkatkan sistem pendataan tracing dan testing dan meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data daerah ke pusat.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah Pusat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelaksanaan vaksinasi di kelompok lansia dengan mengoptimalkan program Prolanis yang sudah menjadi program rutin.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI mengakselerasi praktik percepatan vaksinasi di Jawa Barat yaitu dengan melibatkan dan menempatkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Divisi Vaksinasi.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera mencari titik temu permasalahan aplikasi pendataan penanganan pandemi antara PCare dan Smile sehingga dukungan IT bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam penanganan pandemi dan malah tidak menjadi kendala di daerah.
6. Pentingnya mengadakan rapat gabungan antara Komisi II dan Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Kesehatan RI untuk mencari solusi praktik dalam pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi di daerah sehingga ada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunker Spesifik tentang Pengawasan Pelaksanaan Testing dan Tracing di Provinsi Jawa Barat ini kami susun.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh SKPD and dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat serta seluruh mitra yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 September 2021

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI JAWA BARAT  
KETUA TIM**

**EMANUEL MELKIADES LAKA LENA**

**(A-331)**